

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah bangsa yang kaya dan produktif. Salah satu pemanfaatan kekayaan tersebut adalah pembangunan, yang berusaha menciptakan kemandirian di berbagai daerah atau desa dengan potensi yang beragam, dimana masyarakat desa memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.¹

Pemerintahan desa merupakan satu pemerintahan di Indonesia yang diakui keberadaannya sebagai pemerintah yang legal atas suatu wilayah. Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi daerah Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan desa turut diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan pemerintah desa turut diatur dalam

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah pembangunan pedesaan. Pemerintah telah lama melaksanakan beberapa proyek untuk mendorong ekonomi fundamental di daerah pedesaan. Upaya ini, bagaimanapun, mungkin tidak perlu menghasilkan hasil yang diantisipasi. Keterlibatan masyarakat desa dalam menjalankan dan mengelola perekonomian pedesaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting.²

¹ Amir Hasan. Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian* (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), 1.

² Djoko Pranowo, *Masyaakat Desa* (Surabaya: Bina Ilmu, 2012), 15.

Atas dasar tanggapan tersebut, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap keberadaan desa melalui pemberdayaan ekonomi, yang dilakukan dengan menyusun dan mewakili kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan strategi baru yang diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi pedesaan melalui pembentukan lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.³ Menurut Herry Kamaroesid salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu lembaga ekonomi yang seluruhnya dijalankan oleh masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁴

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansifatif, akuntabel, dan sustainable. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan secara optimal,

³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

⁴ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 2.

tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai asset pergerakan perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dan dibuat untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya keberadaan BUMDes diharapkan mampu membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada dan juga memoptimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ada.⁵

Tujuan BUMDes berupaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dengan membantu memberikan pelayanan sosial yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya lokal yang ingin mendapatkan keuntungan.⁶ Fungsi BUMDes harus menjadi penggerak perekonomian desa, Lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan desa dan jalan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kehadiran BUMDes di desa Ngrame ini sebagai Lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, yang misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan niaga desa, mendukung pemerintah desa dalam usahanya meningkatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia desa,

⁵ Singgih Tri Atmojo “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No.1 (2020), hlm.1-14.

⁶ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 61.

sumber daya dikembangkan untuk membangun ekonomi. Sumber daya dan menjadi pemerintah Desa Ngrame untuk melaksanakan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. BUMDes ini telah dijalankan masyarakat desa di desa Ngrame sejak tahun 2018, dengan jenis usaha pujasera yang terdiri 12 kios.⁷

Desa Ngrame memiliki BUMDes yang dipimpin oleh seorang ketua BUMDes dan deretan divisi lainnya. Meskipun diharapkan BUMDes di Desa Ngrame dapat membantu masyarakat dan dapat membantudalam pendapatan desa, namun sebagai representasi masyarakat Desa secara keseluruhan, masih terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan kemampuan BUMDes untuk dapat berfungsi secara efektif.⁸

Terdiri dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Pungging yaitu: Balongmasin, Bangun, Banjartanggul, Curahmojo, Jabon Tegal, Jatilangkung, Kalipuro, Kedungmungal, Kembangringgit, Lebaksono, Mojorejo, Ngrame, Pungging, Purworejo, Randuharjo, Sekargadung, Tempuran, Tunggalpager, dan Watukenongo.

Penulis juga menambah BUMDES yang ada di Kecamatan Pungging sebagai berikut:

⁷ Mario Wowor, Frans Singkoh, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamangga Kecamatan Tompasso", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.3 (2019). 3.

⁸ Fima Laili Nihayah, Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, Vol.4, No.1, 2021, 36.

Tabel 1.1
Daftar BUMDes di Kecamatan Pungging
Kabupaten Mojokerto

No	Desa	BUMDes	Tahun Berdiri
1.	Desa Randuharjo	Pertanian	2021
2.	Desa Mojorejo	Bumi Bukit Bunga (BBM)	2021
3.	Desa Ngrame	Pujasera	2018
4.	Desa Pungging	Penyediaan Saluran Internet	2022
5.	Desa Banjartanggul	Pujasera	2021
6.	Desa Lebaksono	Jasa Angkutan Barang (Pick Up)	2019
7.	Desa Tunggalpager	Pelayanan Kegiatan Usaha Simpen Pinjem	2020

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa perkembangan BUMDES d Kecamatan Pungging. Tidak semua BUMDES berkembang dengan baik dan masih pemula untuk berkembang, contohnya Desa Banjartanggul, dan Desa Ngrame yang sama-sama mempunyai Badan Usaha Milik Desa berupa pujasera yang pendapatan penjualan pertahunnya tidak sama. Adapun penjelasan dari perbandingan BUMDes Desa Ngrame dan Desa Banjartaggu berdasakan Lokasi, Jam Operasional, dan Pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan Lokasi, Jam Operasional, dan Pelayanan dari
BUMDES Desa Banjartanggul. dan Desa Ngrame

No	Perbandingan	Desa Banjartanggul	Desa Ngrame
1.	Lokasi	Mempunyai BUMDES berupa Pujasera yang berlokasi di Ds. Sruni, Banjartanggul, Pungging-Mojokerto	Mempunyai BUMDES berupa Pujasera yang lokasinya di Dsn. Gading, Ds. Ngrame, Pungging-Mojokerto
2.	Jam Operasional	Senin-Sabtu 08.00-16.00. Minggu libur.	Setiap hari buka Senin-jumat 08.00-21.00 Sabtu-Minggu 08.00-24.00
3.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan salam dan terimakasih. 2. Tidak ramah terhadap pelanggan. 3. Memberikan informasi hanya yang dibutuhkan oleh narasumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan salam, senyum, sapa, dan terimakasih. 2. Membangun sikap yang baik terhadap pelanggan. 3. Memberikan informasi yang sangat baik, tidak hanya pertanyaan yang dibutuhkan narasumber, sehingga mempunyai wawasan yang luas tegan BUMDES di Desa Ngrame.

Sumber: Hasil olah data dari wawancara

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang perbedaan BUMDes yang sama-sama berbentuk pujasera yaitu yang memiliki perbedaan lokasi, jam operasional, dan pelayanan.⁹

BUMDes Desa Ngrame cukup menarik untuk diteliti karena lembaga ini berfungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta

⁹Romaiki Hafni, Efektivitas Pengelolaan BUMDes Sataretanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *Jurnal Al-Muqayyad* Vol.4, No.2 (2021), 99.

menambah pendapatan pada desa. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga menambah pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jika dilihat kembali, berdirinya BUMDes di Desa Ngrame berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yakni untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mengembangkan usaha perekonomian di masyarakat dan dapat guna meningkatkan pendapatan pada desa.

Peneliti memilih Badan usaha milik desa, Desa Ngrame sebagai objek penelitian dikarenakan BUMDes Desa Ngrame merupakan desa yang mempunyai badan usaha milik desa dan telah berjalan selama 5 tahun walaupun badan usaha milik desa masih seumur jagung tetapi sudah terlihat dampak perubahannya.

Hal mendasar yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa Ngrame sangat gesit dalam membangun pendapatan desanya yang sangat berperan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran BUMDes Rest Area Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngrame?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan Desa Ngrame Kecamatan Pungging?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngrame.
2. Untuk mengkaji Peran BUMDes untuk meningkatkan pendapatan di Desa Ngrame Kecamatan Pungging.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Desa, badan usaha milik desa memiliki peran yang cukup besar
Secara garis besar badan usaha milik desa memiliki dua manfaat yaitu:
 - a. Komersil, sebagai lembaga komersil BUMDES mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan terhadap desa.
 - b. Pelayanan public, badan usaha milik desa tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi badan usaha milik desa juga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi dibidang pelayanan social.

2. Bagi penulis sendiri, sebagai ilmu pengetahuan baru, dan penambah wawasan mengenai Apakah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Berperan Terhadap Pendapatan Desa.
3. Bagi pembaca, sebagai referensi dan bahan tambahan pengetahuan tentang tema, khususnya pada peran pengembangan BUMDes rest area dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan panduan atau acuan dalam melakukan penelitian dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan peran pengembangan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholikhah (IAIN Kediri, 2020) yang berjudul "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya BUMDes gadungan ini mereka bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Pemberdayaan (KPMD) yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa. Kehadiran BUMDes tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti, yaitu dalam membantu meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya melalui program pelatihan,

pembinaan, dan konsultasi, agar masyarakat memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam membuka usaha ataupun mengelola usaha.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zilqy Dwifadlurrohman (IAIN Kediri 2022) yang berjudul “Strategi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Strategi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lembaga BUMDesMA bersifat kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat pada kelembagaan BUMDesMA harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan program usaha. Peran lembaga BUMDesMA dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih mengalami beberapa kendala, seperti minimnya SDM yang berkompeten, kurangnya komunikasi antara pihak BUMDesMA dengan pemerintah Desa. Dalam tinjauan Manajemen Strategi Syariah, sudah menjurus ke prinsip-prinsip Syariah, walaupun masih ada program kerja yang menerapkan sistem bunga, namun pihak lembaga memiliki tekad untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya agar dalam menjalankan prokernya berdasarkan syariat Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Septa Pratama (IAIN KEDIRI 2021) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Ditinjau Dari Perda No 7 Tahun 2017 Dan Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa wonorejo Kecamatan Wates”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yaitu studi kasus dengan peneliti sebagai sumber kunci. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BUMDes Wonorejo sudah cukup efektif dalam membantu memperbaiki perekonomian masyarakat dan mempengaruhi pendapatan asli desa Wonorejo. Dari sudut pandang manajemen syariah, BUMDes Wonorejo mulai dari perencanaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengorganisasian telah sesuai dengan Perda yaitu terdiri dari Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Dewi Fitria (IAIN KEDIRI 2021) yang berjudul ”Analisis Pengembangan Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Wisata Edukasi Kampung Lele Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan potensi wisata edukasi kampung lele dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pendapatan tempat wisata serta kenaikan pendapatan karyawan. Dan tinjauan dari

segi manajemen syariah wisata edukasi kampung lele telah menerapkan fungsi manajemen syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Pungky Novitasari (IAIN KEDIRI 2022) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanon Kec. Papar Kab. Kediri”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Dalam mengupayakan pengembangan usaha perikanan BUM Desa memiliki program-program dalam mendorong peningkatan usaha masyarakat. Program-program yang dimiliki BUM Desa adalah membentuk unit usaha perikanan, membuka unit usaha perikanan, membuka unit usaha perdagangan dan melakukan kerja sama dengan Dinas Perikanan terkait pemantauan perikanan dan pengolahan hasil panen ikan.